

**PERANCANGAN GEDUNG DPRD KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR**

TUGAS AKHIR



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Disusun Oleh:

MUHAMMAD ALFIN BURHANNUDIN

NIM: H73218036

**PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Alfin Burhannudin

NIM : H73218036

Program Studi : Arsitektur

Angkatan : 2018

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan Tugas Akhir saya yang berjudul: “PERANCANGAN GEDUNG DPRD KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR” Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan tindakan plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 10 Januari 2023

Yang menyatakan,



(Muhammad Alfin Burhannudin)

NIM H73218036

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir oleh

NAMA : MUHAMMAD ALFIN BURHANNUDIN
NIM : H73218036
JUDUL : PERANCANGAN GEDUNG DPRD KABUPATEN
BOJONEGORO DENGAN PENDEKATAN
ARSITEKTUR
NEO-VERNAKULAR

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 10 Januari 2023

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



(Oktavi Elok Hapsari., S.T, M.T)

(Kusnul Prianto.,S.T, M.T, I.P.M)

NIP. 198510042014032004

NIP.197904022014031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Perancangan Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan Pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular ini telah dipertahankan di depan tim penguji Tugas Akhir di Surabaya, 10 Januari 2023

Mengesahkan, Dewan Penguji

Penguji I



(Oktavi Elok Hapsari., S.T, M.T)

NIP. 198510042014032004

Penguji II



(Kusnul Prianto.,S.T, M.T, I.P.M)

NIP. 197904022014031001

Penguji III



(Dr. Rita Ernawati., S.T, M.T)

NIP. 198008032014032001

Penguji IV



(Yusrianti., M.T)

NIP. 198210222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Surabaya



Dr. Abdul Hamdani., M. Pd

NIP. 196507312000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD ALFIN BURHANNUDIN
NIM : H73218036
Fakultas/Jurusan : SAINS DAN TEKNOLOGI/ARSITEKTUR
E-mail address : alfin.burhan11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :
« PERANCANGAN GEDUNG DPRD KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR »

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2023

Penulis



(Muhammad Alfin Burhannudin)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

PERANCANGAN GEDUNG DPRD KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR

Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang terletak disebalah barat provinsi jawa timur. Bojonegoro mulai dikenal luas oleh masyarakat dikarenakan memiliki berbagai sumberdaya antara lain dari sektor industri ada tambang minyak dan gas yang tersebar diberbagai kecamatan diBojonegoro. Selain itu Bojonegoro juga memiliki budaya dan unsur lokal antara lain tari tengul dan suku samin yang berada di kecamatan Margomulyo. Sehingga untuk mengatur dan mengelola sumber daya tersebut, pemerintah daerah dengan diawasi DPRD Bojonegoro dituntut agar sumber daya tersebut mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Bojonegoro. Akan tetapi fasilitas untuk menunjang kinerja DPRD Bojonegoro ini kurang memadai, dikarenakan desain serta tata letak dari fasilitas tersebut kurang tepat. Sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal berdasarkan peran dalam pemerintahan.

Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menyediakan wadah yang mampu menunjang kebutuhan kinerja DPRD Bojonegoro meliputi bangunan dengan fasilitas dan ruangan yang memadai. Pendekatan Arsitektur neo-vernakular dipilih untuk memberikan suatu desain arsitektural yang mencerminkan unsur lokal yang ada diBojonegoro sehingga dari hasil rancangan nanti bisa memberikan citra kantor DPRD yang khas, yang diterapkan melalui eksterior dan interior serta elemen-elemen penunjang lainnya.

Kata kunci : Perancangan, Sumberdaya, Unsur lokal, DPRD, Neo-vernakular, Bojonegoro.

ABSTRACT

DESIGN OF THE BOJONEGORO DISTRICT PARLIAMENT BUILDING WITH A NEO-VERNACULAR ARCHITECTURAL APPROACH

Bojonegoro is a district located in the west of East Java province. Bojonegoro is starting to be widely known by the public because it has various resources, including from the industrial sector, there are oil and gas mines spread across various sub-districts in Bojonegoro. In addition, Bojonegoro also has local culture and elements, including the Tengul dance and the Samin tribe in the Margomulyo sub-district. So that in order to regulate and manage these resources, the regional government under the supervision of the Bojonegoro DPRD is required that these resources be utilized as well as possible, so that they can provide real benefits for the people of Bojonegoro. However, the facilities to support the performance of the Bojonegoro DPRD are inadequate, because the design and layout of these facilities are not quite right. So that in its implementation it is less than optimal based on the role in government.

This problem can be solved by providing a forum that is able to support the performance needs of the Bojonegoro DPRD including buildings with adequate facilities and rooms. The neo-vernacular architectural approach was chosen to provide an architectural design that reflects local elements in Bojonegoro so that from the design results it can provide a distinctive DPRD office image, which is implemented through the exterior and interior as well as other supporting elements.

Keywords : Design, Resources, Local elements, DPRD, Neo-vernacular, Bojonegoro.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah dan Tujuan Perancangan	3
1.3. Batasan Perancangan	4
BAB II TINJAUAN DAN OBJEK PERANCANGAN	5
2.1. Pengertian Bangunan Publik	5
2.2. Persyaratan Bangunan Gedung Negara	5
2.3. Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung Negara	6
2.4. Aktivitas Dan Kebutuhan Ruang	7
2.5. Penjelasan Lokasi Rancangan	10
2.5.1. Site Terpilih	10
2.5.2. Batas Site	10
2.5.3. Dimensi Site	11
2.5.4. Kondisi Eksisting Site	11
2.5.5. Potensi Tapak	12

BAB III PENDEKATAN DAN PERANCANGAN	13
3.1. Pendekatan Arsitektur Neo-vernakular	13
3.2. Arsitektur Neo-vernakular di Bojonegoro.....	14
3.3. Integrasi Keislaman	14
3.4. Konsep Perancangan	15
BAB IV HASIL PERANCANGAN	17
4.1. Perancangan Arsitektur.....	17
4.1.1. Penataan Tapak.....	17
4.1.2. Konsep Sirkulasi Tapak	18
4.1.3. Konsep Ruang Luar	19
4.1.4. Konsep Bangunan	20
4.1.5. Konsep Struktur.....	21
4.1.6. Konsep Utilitas	22
4.1.6.1. Utilitas Air Bersih dan Kotor.....	22
4.1.6.2. Utilitas Listrik	23
4.1.6.3. Utilitas Pemadam Kebakaran	24
BAB V PENUTUP	25
5.1. Kesimpulan	25
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	28

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DPRD Bojonegoro	3
Gambar 2. 1 Site Terpilih	10
Gambar 2. 2 Dimensi Tapak	11
Gambar 2. 3 Kondisi Eksisting Tapak	12
Gambar 3. 1 Skema Konsep Perancangan	16
Gambar 4. 1 Konsep Tapak	17
Gambar 4. 2 View Dari Luar Tapak.....	18
Gambar 4. 3 Konsep Sirkulasi.....	19
Gambar 4. 4 Konsep Ruang Luar.....	19
Gambar 4. 5 Konsep Bangunan.....	20
Gambar 4. 6 Bangunan Utama Gedung DPRD.....	20
Gambar 4. 7 Interior Bangunan.....	21
Gambar 4. 8 Konsep Struktur.....	21
Gambar 4. 9 Skema Air Bersih Dan Kotor	22
Gambar 4. 10 Layout Air Bersih Dan Kotor.....	22
Gambar 4. 11 Skema Kelistrikan	23
Gambar 4. 12 Layout Utilitas Kelistrikan	23
Gambar 4. 13 Layout Utilitas Kebakaran.....	24

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Analisis Aktivitas	7
Tabel 2. 2 Analisis Kebutuhan Ruang.....	8



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang berbentuk republik yang dimana Presiden republik Indonesia pemegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pemerintahan adalah salah satu sistem yang dilakukan oleh badan Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif yang ada disuatu negara untuk mencapai suatu tujuan. Menurut UUD 1945 pasal 18 ayat 3 menyebutkan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. DPRD kemudian diatur lebih jelasnya pada undang-undang nomor 17 tahun 2014. Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan salah satu lembaga legislatif pemerintah yang susunannya mencerminkan dari perwakilan rakyat seluruh daerah. Lembaga ini dibentuk oleh kedaulatan rakyat daerah melalui pemilihan umum yang menghasilkan wakil rakyat untuk mewakili, menyalurkan aspirasi rakyat ditingkat kabupaten atau kota. Untuk menunjang fungsi kegiatan dari DPRD harus diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai, agar sistem berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan bukan hanya menjadi sistem belaka, tetapi bisa mencukupi kebutuhan dan kenyamanan untuk menunjang suatu sistem yang sedang berjalan khususnya dipemerintahan. Selain sarana dan prasarana, fasilitas juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan.

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro adalah lembaga yang berwenang dalam melakukan tugas legislasi dan persetujuan terhadap aturan daerah dan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Tugas DPRD tersebut membuatnya memiliki hak legislatif membentuk peraturan daerah bersama dengan eksekutif, memberikan persetujuan rancangan anggaran dan peraturan, memberikan pendapat, hingga pengawasan kekuasaan dan kebijakan eksekutif dalam ruang lingkup daerah. Sistem yang terbuka dan transparan pada pemerintah adalah salah satu kunci terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Tetapi hal tersebut harus

juga diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadahi, agar sistem berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan bukan hanya menjadi sistem belaka, tetapi bisa mencukupi kebutuhan dan kenyamanan untuk menunjang suatu sistem yang sedang berjalan khususnya dipemerintahan. Selain sarana dan prasarana, fasilitas juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan.

Dilansir dari website resmi DPRD Bojonegoro (dprd.bojonegorokab.go.id) dari hasil rapat antara DPRD dan dinas perumahan kawasan permukiman (PKP) dan cipta karya, senin (8/6/2020); “Gedung DPRD Bojonegoro akhirnya batal dibangun tahun ini. Gedung yang rencananya dibangun empat lantai itu dipastikan dibangun tahun depan”. Dari hasil rapat tersebut sudah jelas bahwa rencana pembangunan gedung DPRD menjadi wacana pemkab Bojonegoro.

Dari data resmi pemerintah kabupaten Bojonegoro anggota DPRD berjumlah 50 orang dari 11 partai politik, dari 50 anggota tersebut terbagi menjadi 4 komisi sebagai berikut;

1. Komisi A

Bidang Hukum, Pemerintahan, Pertanahan, Ketertiban masyarakat, Penerangan/Pers, Kepegawaian, Sosial Politik, Umum, Sekretariat DPRD dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Komisi B

Bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Ketahanan Pangan, Keuangan & Aset Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah/Patungan, Penanaman Modal, Pariwisata, Seni, Kebudayaan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, & Perekonomian.

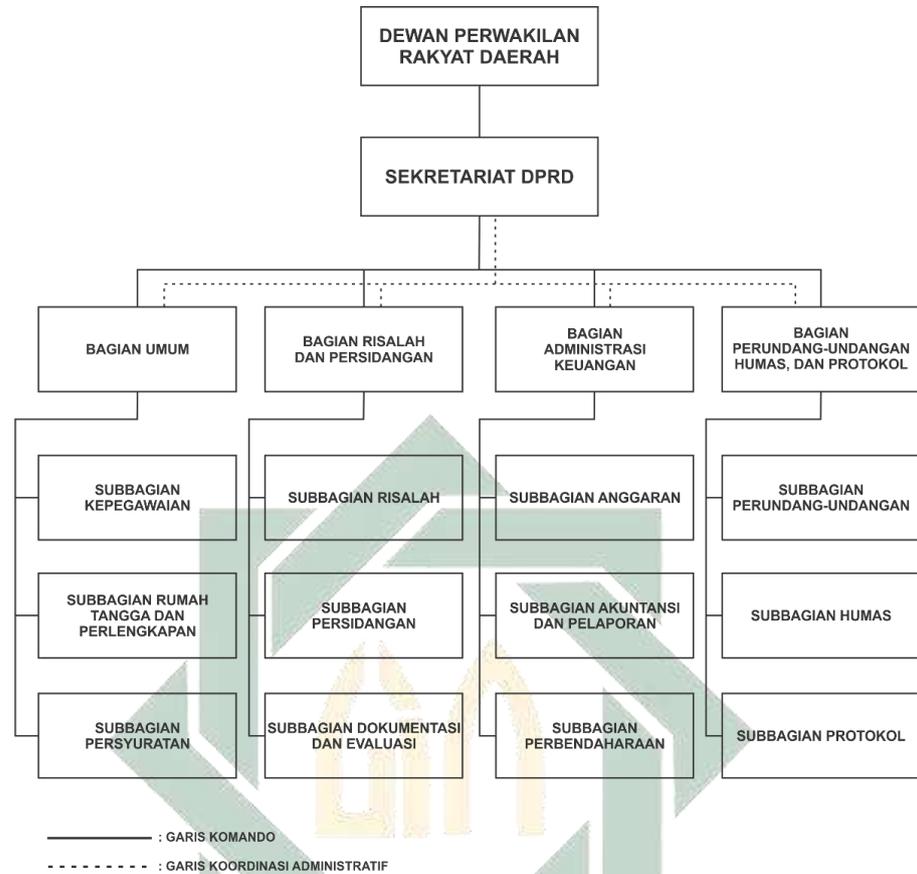
3. Komisi C

Bidang Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Pertambangan & Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Perencanaan Pembangunan, Pengairan dan Perhubungan

4. Komisi D

Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Rakyat, Sosial,

Kepemudaan, Olah Raga, Peranan Wanita, Keluarga Berencana, Agama, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi DPRD Bojonegoro

Sumber: *perda kabupaten Bojonegoro no.7 tahun 2011*

Perancangan gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro ini menggunakan pendekatan arsitektur neo-vernakular. Dari pendekatan ini diharapkan bisa menghasilkan suatu rancangan yang mencerminkan unsur-unsur lokal yang ada di Bojonegoro, sehingga secara tidak langsung juga ikut mengenalkan dan mempromosikan unsur lokal yang ada di Bojonegoro ke khalayak umum.

1.2. Rumusan Masalah Dan Tujuan Perancangan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan sebuah masalah yaitu bagaimana merancang gedung DPRD kabupaten Bojonegoro dengan mempertimbangkan fungsi, kebutuhan dan hasil desain yang dapat mencerminkan suatu daerah dengan menggunakan pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular.

Tujuan perancangan gedung DPRD kabupaten Bojonegoro ini adalah untuk menghasilkan rancangan gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro yang bisa

menunjang kinerja DPRD Kabupaten Bojonegoro yang lebih progresif serta mencerminkan unsur lokal Bojonegoro.

1.3. Batasan Perancangan

Batasan yang melingkupi perancangan gedung DPRD di Kabupaten Bojonegoro antara lain :

1. Lokasi perancangan berada di Jln. Veteran Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
2. Skala kegiatan rancangan gedung DPRD ini adalah lingkup Kabupaten atau Kota yang dimana sebagai tempat atau wadah masyarakat Bojonegoro untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada perwakilan rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Perancangan gedung DPRD kabupaten Bojonegoro ini menggunakan pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular yang diharapkan nantinya menghasilkan desain yang mencerminkan suatu daerah tersebut yaitu Bojonegoro.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN OBJEK DAN LOKASI PERANCANGAN

2.1. Pengertian Bangunan Publik

Bangunan publik merupakan bangunan yang tidak diperuntukan untuk hunian pribadi melainkan untuk sarana dan pra sarana dalam menunjang kebutuhan atau kepentingan tertentu disuatu daerah. Bangunan publik identik dengan pusat pelayanan kemasyarakatan yang berkaitan dengan ekonomi, keamanan, pemerintahan, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung: Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi budaya dan sosial. Dapat disimpulkan bahwa bangunan umum atau publik khususnya gedung DPRD adalah suatu bangunan dengan fungsi untuk pelayanan masyarakat dan juga sebagai pusat tempat atau wadah untuk menyalurkan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro.

2.2. Persyaratan Gedung Bangunan Negara

Persyaratan Bangunan Gedung Negara merupakan suatu pra kondisi yang harus dipenuhi dalam pembangunan Bangunan Gedung Negara. Persyaratan Bangunan Gedung Negara merupakan ketentuan-ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembangunan Bangunan Gedung Negara, baik secara administrasi, maupun dalam hal teknis, agar Bangunan Gedung Negara yang dibangun diselenggarakan secara tertib, dapat berfungsi sesuai rencananya dan diwujudkan secara andal sebagai wujud konstruksi tempat manusia melaksanakan kegiatannya.

Persyaratan Bangunan Gedung Negara, pada prinsipnya harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana bangunan gedung pada umumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya. Namun sebagai bangunan gedung yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN dan/atau APBD, diperlukan

memenuhkan persyaratan-persyaratan tambahan atau khusus, seperti harus adanya dokumen pendanaan, dokumen perencanaan, dokumen pembangunan, dan dokumen pendaftaran, dalam hal persyaratan administrasi, serta standar luas bangunan, klasifikasi bangunan, jumlah lantai, dan spesifikasi teknis tertentu dalam hal persyaratan teknis Menurut Permen PU No.45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN); Standar Luas Bangunan Gedung Negara Gedung Kantor Dalam menghitung luas ruang bangunan gedung kantor yang diperlukan, dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 1. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m²/personil. 2. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10 m²/personil. 3. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruangruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, kebutuhannya dihitung secara tersendiri (studi kebutuhan ruang) diluar luas ruangan untuk seluruh personil yang akan ditampung. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Standar Luas Gedung Kantor luas ruang kerja dan ruang rapat untuk pejabat tingkat DPRD yang tergolong Eselon IIA yaitu ruang kerja memiliki standar luas sebesar 14 m² dan ruang rapat sebesar 14 m² .

2.3. Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung Negara

Persyaratan arsitektur bangunan gedung negara, meliputi: persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang-dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

- a. Wujud atau penampilan bangunan gedung harus:
 - 1) mencerminkan fungsi sebagai Bangunan Gedung Negara;
 - 2) seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya;
 - 3) indah tetapi tidak berlebihan;
 - 4) efisiensi penggunaan sumber daya baik dalam pemanfaatan maupun dalam pemeliharaan;
 - 5) mempertimbangkan nilai sosial budaya setempat dalam menerapkan

perkembangan arsitektur dan rekayasa;

6) mempertimbangkan kaidah pelestarian bangunan baik dari segi sejarah maupun langgam arsitektur; dan

7) membentuk denah bangunan gedung yang sedapat mungkin simetris dan sederhana.

b. Tata ruang dalam Bangunan Gedung Negara harus memperhatikan:

1) fungsi ruang bangunan gedung;

2) efektivitas dan efisiensi tata ruang dalam;

3) kaidah arsitektur bangunan gedung secara keseluruhan; dan 4) keandalan bangunan gedung yang meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan tata ruang-dalam.

c. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung Negara dengan lingkungannya diartikan bahwa harus memperhatikan:

1) terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya;

2) pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia; dan

3) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di dalam dan di luar bangunan gedung.

2.4. Aktivitas dan Kebutuhan Ruang

Analisis aktivitas dan kebutuhan ruang merupakan gambaran awal serta umum dari aspek bangunan atau ruang yang digunakan. Dengan harapan dapat mengetahui estimasi luasan serta jumlah lantai bangunan berdasarkan dari kebutuhan pengguna. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai 2.1 analisis aktivitas dan 2.2 analisis kebutuhan ruang berikut;

Tabel 2.1 Analisis Aktivitas

No	Kegiatan	Pengguna	Ruang
1	Sosialisasi	-Umum	-R. Pendopo -R. Pengelola -Lavatori
2	Sidang	-Masyarakat-pers -Anggota DPRD -Petugas -Anggota Eksekutif	-R. Sidang paripurna -R. Sidang Fraksi -R. Sidang Komisi -R. Pengelola

			-R. Pengunjung -R. Pers -Lavatori
3	Istirahat	-Umum	-Taman -Masjid/Musholla -Kantin -Perpustakaan -Lapangan
4	Penerima	-Masyarakat-pers -Anggota DPRD -Petugas	-Lobby -R. Informasi -R. Tunggu
5	Pelayanan	-Petugas -Tamun -Anggota DPRD	-R. Tamun -R. Pers -R. Penyampaian pendapat
6	Kunjungan Kerja	-Anggota DPRD -Petugas	-R. Transit -R. Tunggu
7	Rutinitas Kerja	-Anggota DPRD -Sekretariat -Staff/Karyawan	-R. Ketua DPRD -R. Wakil Ketua -R. Komisi -R. Fraksi -R. Arsip -R. Sekretaris -R. Kasubag -R. Staff/Karyawan -Lavatori
8	Parkir	-Anggota DPRD -Sekretariat -Tamun	-Parkir Motor -Parkir Mobil -Parkir Bus -Pos

Sumber : Analisis pribadi 2022

Tabel 2.2 Analisis Kebutuhan Ruang

RUANG UTAMA						
No	Ruang	Studi	Kapasitas	Standart/m ² Org	Jumlah Ruang	Besaran
1	R. Sidang Paripurna	Studi Kasus	200	1,25	1	250 m ²
2	R. Sidang Fraksi	Studi Kasus	15	1,25	4	75 m ²
3	R. Sidang Komsu	Studi Kasus	15	1,25	4	75 m ²
4	R. Pengelola	DA	3	2	3	18 m ²
5	R. Kunjungan	Studi	8	3	1	24 m ²

		Kasus				
6	R. Pers	Studi Kasus	10	2,5	2	50 m ²
7	Lavatori	DA	1	1,4	32	45 m ²
8	Lobby	DA	15	2	1	30 m ²
9	R. Informasi	DA	3	2	1	6 m ²
10	R. Tunggu	PerMen	12	1	1	12 m ²
11	R. Ketua DPRD	PerMen	1	-	1	14 m ²
12	R. Wakil Ketua	PerMen	1	-	1	14 m ²
13	R. Komisi	PerMen	1	-	4	56 m ²
14	R. Fraksi	PerMen	1	-	4	56 m ²
15	R. Arsip	PerMen	1	-	1	14 m ²
16	R. Sekretaris	PerMen	1	-	1	14 m ²
17	R. Kasubag	PerMen	1	-	4	14 m ²
18	R. Staf/Karyawan	PerMen	2	4,4	8	35 m ²
19	R. Transit	Studi Kasus	10	3	1	30 m ²
20	R. Tamu	PerMen	12	-	1	12 m ²
21	R. Penyampaian Pendapat	Studi Kasus	10	3	1	30 m ²
TOTAL						874 m²
RUANG PENUNJANG						
1	Pendopo	Studi Kasus	300	1,4	1	420 m ²
2	R. Pengelola	DA	5	2	3	30 m ²
3	Musholla	DA	80	1,2	1	96 m ²
4	Kantin	Studi Kasus	50	2	1	100 m ²
5	Dapur	DA	5	1,3	3	19,5 m ²
6	Perpustakaan	PerMen	10	2	1	20 m ²
7	Lavatori	DA	1	1,4	8	11,2 m ²

8	Taman	Menyesuaikan				
9	Lapangan	Studi Kasus	200	1,4	1	280 m ²
10	Parkir Motor	DA	100	0,6	1	60 m ²
11	Parkir Mobil	DA	50	12,5	1	625 m ²
12	Parkir Bus	DA	3	27,5	1	82,5 m ²
JUMLAH						1.744 m²
TOTAL SELURUH BANGUNAN						1.963 m²
SIRKULASI 30%						599 m²
JUMLAH KESELURUHAN						2.618 m²

Sumber : *Analisis pribadi 2022*

2.5. Penjelasan Lokasi Rancangan

2.5.1. Site Terpilih

Penentuan lokasi perancangan ini berdasarkan rencana dari pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tepatnya di Jln. Veteran Bojonegoro dengan luas site ± 2 ha. Pada lokasi yang telah ditentukan ini sangat strategis karena berada dipusat kota Bojonegoro sehingga sangat tepat jika dijadikan lokasi perancangan gedung DPRD Bojonegoro.



Gambar 2.1 Site Terpilih

Sumber : *google maps dan analisis pribadi 2022*

2.5.2. Batas Site

Site yang menghadap kebarat tepatnya di jalan Veteran Bojonegoro memiliki batas sebagai berikut.

Utara : Toko, Hotel

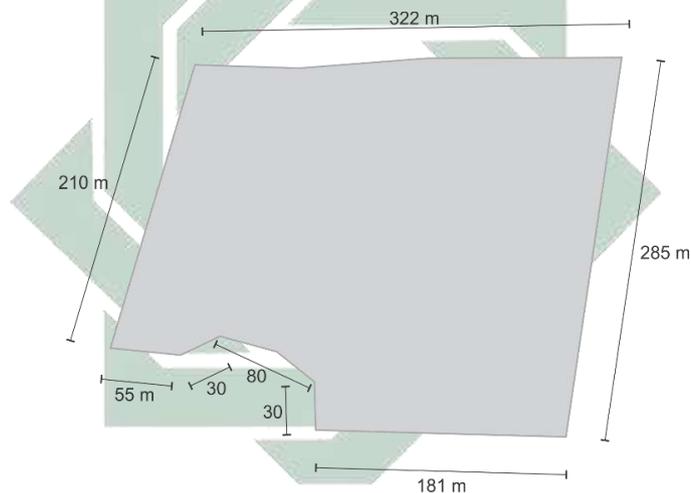
Barat : Hotel, Mall

Selatan : Lahan Kosong, Sawah

Timur : Lahan Kosong, Sawah

2.5.3. Dimensi Site

Menurut Perda Kabupaten Bojonegoro No 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031 tapak memiliki persentase KDB 70 % dan RTH 30 %.



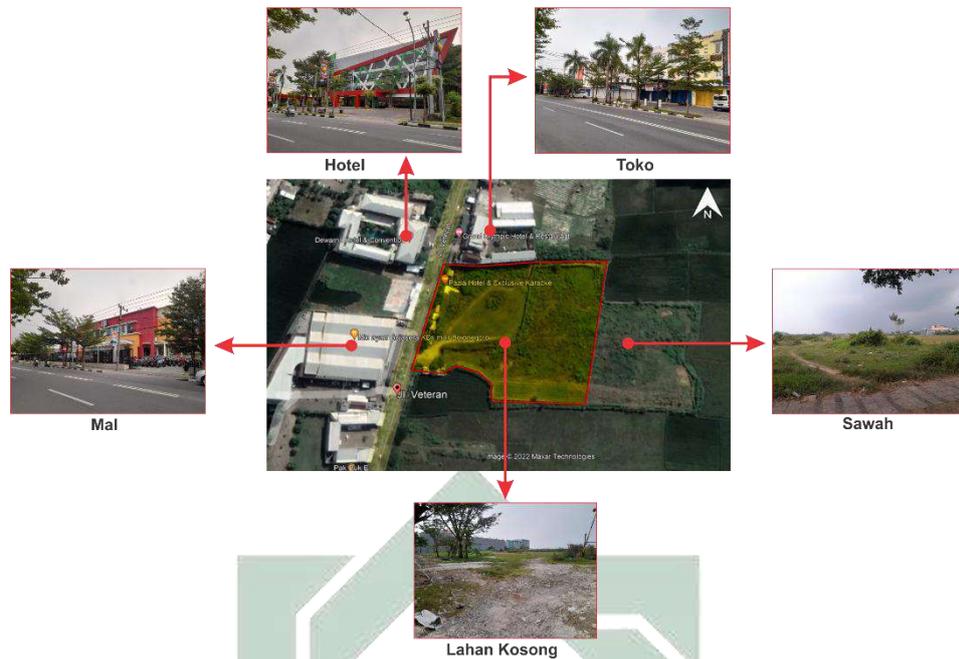
Gambar 2.2 Dimensi Tapak

Sumber : gambar pribadi 2022

2.5.4. Kondisi Eksisting Site

Kondisi eksisting tapak merupakan lahan kosong yang dimana lahan ini milik aset pemerintahan kota Bojonegoro yang menghadap kearah barat tepatnya berhadapan dengan jalan Veteran. Pada sekitar tapak dibagian timur dan selatan adalah lahan kosong dan area persawahan sehingga masih sangat sejuk udaranya dan disebalah barat dan utara terdapat mall, hottel dan toko, lebih jelasnya bisa

dilihat pada gambar 2.3 berikut.



Gambar 2.3 Kondisi Eksisting Tapak

Sumber : gambar pribadi 2022

2.5.5. Potensi Tapak

Potensi dan hambatan adalah suatu keadaan atau kondisi pada site dan sekitarnya yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam merancang gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro ini.

a. Potensi

1. Lokasi site yang terpilih berada di Jln. Veteran berada dipusat perkotaan.
2. Site dekat dengan jalur lintas kota atau kabupaten.
3. Dekat dengan terminal dengan jarak ± 500 m sedangkan dari stasiun Bojonegoro berjarak ± 2 km.
4. Akses menuju tapak dapat dijangkau berbagai transportasi.
5. Pada lokasi site sudah tersedia jaringan listrik dan juga tersedia jaringan air PDAM.

BAB III

PENDEKATAN DAN KONSEP PERANCANGAN

3.1. Pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular

Arsitektur neo-vernakular adalah salah satu aliran arsitektur yang berkembang pada era post modern yaitu aliran arsitektur yang mulai muncul pada pertengahan tahun 1960-an, post modern lahir disebabkan pada era modern timbul protes dari beberapa arsitek terhadap pola-pola yang terkesan monoton. Menurut Budi A Sukada (1988) dari semua aliran yang berkembang pada era post modern, memiliki 10 ciri-ciri arsitektur sebagai berikut;

1. Mengandung unsur komunikatif yang bersikap lokal.
2. Membangkitkan kembali kenangan historik.
3. Berkonteks urban.
4. Menerapkan kembali teknik ornamentasi.
5. Bersifat representasional (mewakili seluruhnya).
6. Bersifat metaforik (dapat berarti bentuk lain).
7. Dihasilkan dari partisipasi.
8. Mencerminkan aspirasi umum.
9. Bersifat plural.
10. Bersifat eklektik.

Sebuah karya arsitektur dapat dikategorikan ke dalam arsitektur *post modern* (neo vernakular) yaitu suatu karya arsitektur yang memiliki enam atau lebih dari ciri-ciri diatas.

Menurut Yulianto Sumalyo (1993), vernakular adalah bahasa lokal, dalam arsitektur vernakular adalah bentuk arsitektur yang menerapkan ciri-ciri budaya sekitar termasuk dengan material, iklim dan sebagainya.

Dari beberapa teori diatas tentang arsitektur neo vernakular dapat ditarik kesimpulan bahwa arsitektur neo vernakular adalah suatu aliran arsitektur yang bersifat lokal dari suatu daerah yang dimana dalam suatu daerah tersebut memiliki beberapa unsur mulai dari unsur budaya, material, iklim, dan sebagainya. Semua unsur

yang ada didaerah tersebut yang nantinya akan dibuat sebagai pertimbangan dalam merancang sebuah bangunan sehingga dari hasil rancangan tersebut bisa mencerminkan atau menjadi ikon unsur lokal didaerah tersebut.

3.2. Arsitektur Neo-Vernakular di Bojonegoro

Bojonegoro memiliki salah satu suku yang masih ada hingga saat ini yaitu suku samin atau yang sering disebut SAMINISME, suku ini berada dipelosok hutan yang terpencil tepatnya didusun Jepang desa Margomulyo kecamatan Margomulyo yang berjarak kurang lebih 60 km arah barat daya kota Bojonegoro. Menurut Mbah Harjo yang merupakan cicit ke empat Samin Surosentiko, salah satu kebiasaan yang masih dipertahankan oleh masyarakat Samin dan sekitarnya di dusun Jipang yakni gotong royong seperti misalnya membangun rumah tanpa ada perbedaan apakah rumah suku Samin atau bukan Samin. Rumah Srotong merupakan bangunan yang secara turun-temurun dibuat oleh masyarakat suku Samin. Dalam skala lingkungan masyarakat suku Samin, masing-masing kepala keluarga suku Samin memiliki rumah Srotong. Selain nama Srotong, rumah adat suku Samin sering juga disebut dengan nama rumah bekuk lulang.

3.3. Integrasi Nilai Keislaman

Integrasi keislaman adalah suatu proses mengintegrasikan hubungan antara perancangan gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan nilai-nilai keislaman yaitu dengan ayat-ayat Al Qur'an.

Dalam hal ini, mengacu ke tugas dan wewenang sebagai anggota DPRD sebagai lembaga legislatif yang tugasnya merancang dan menetapkan aturan-aturan serta kebijakan dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Menjadi pemimpin adalah suatu kepercayaan yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh, amanah serta tanggung jawab. Dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 135 Allah SWT berfirman;

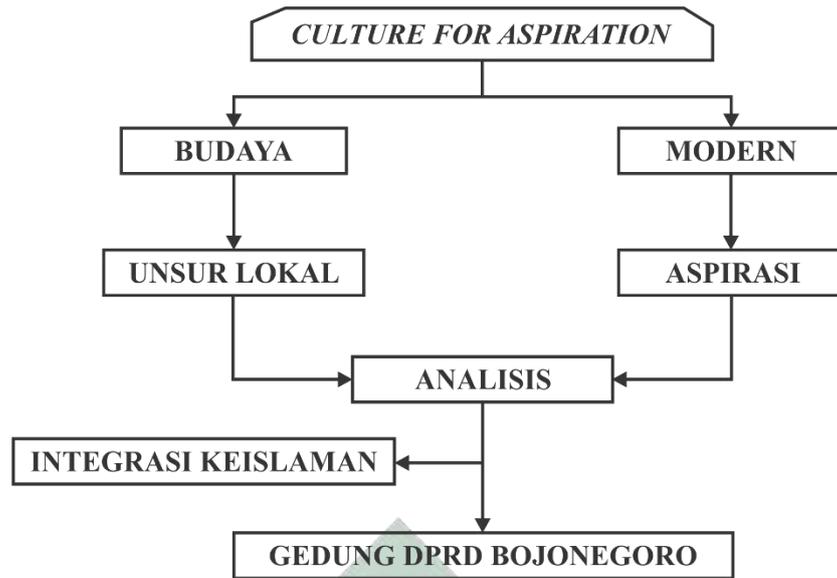
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
 فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’ : 135).

Pada ayat tersebut dijelaskan tentang pentingnya sebagai seorang pemimpin yang harus menegakkan keadilan untuk menetapkan kebijakan dan keputusan. Namun, semua harus dijalankan atas dasar iman, akal sehat dan kemaslahatan. Rasulullah SAW jauh-jauh hari memberikan panduan perihal kepemimpinan dengan mengutamakan sikap adil, yakni memberikan amanah kepada orang-orang yang kompeten.

3.4. Konsep Perancangan

Konsep perancangan pada gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro ini adalah “*Culture for Aspiration*” yaitu membawa budaya menuju aspirasi sesuai dengan salah satu fungsi bangunan gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro yaitu menyerap aspirasi rakyat. Dari kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan tradisional (arsitektur Jawa khas suku Samin yang ada di Bojonegoro) dengan menerapkan unsur-unsur lokal dan kebudayaan modern yang berkembang saat ini sesuai dengan pendekatan arsitektur neo-vernakular.



Gambar 3.1 Skema Konsep Perancangan

Sumber : gambar pribadi 2023

Dari skema konsep diatas mengacu pada pendekatan perancangan pendekatan neo-vernakular yang dimana dari skema diatas ada dua unsur yaitu lokal sebagai unsur budaya dan aspirasi sebagai unsur modern. Dari dua unsur tersebut dipadukan menghasilkan desain yang modern namun tetap menghadirkan unsur-unsur lokal yang ada di daerah sehingga secara tidak langsung bisa menginspirasi masyarakat umum untuk menyampaikan pendapatnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

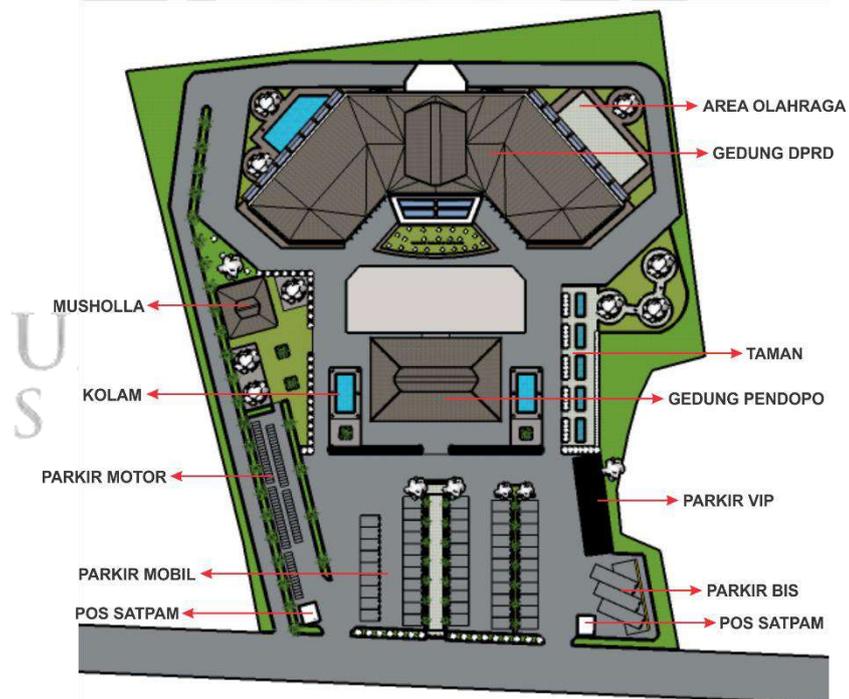
HASIL PERANCANGAN

4.1. Perancangan Arsitektur

Hasil perancangan arsitektur adalah hasil rancangan dari analisis dan merupakan penyelesaian dari masalah yang ada. Berikut adalah hasil dari rancangan gedung DPRD di Kabupaten Bojonegoro ;

4.1.1. Penataan Tapak

Mengacu pada rumah sotrong tentang pembagian ruang pada rumah yaitu ada dua bagian depan dan bagian dalam. Pada bagian depan diimplentasikan pada bangunan pendopo dan bagian dalam diimplentasikan ke bangunan utama yaitu gedung DPRD. Sehingga dari pembagian zona tersebut bisa memudahkan dalam mengakses ke setiap bangunan sesuai dengan kepentingan masing-masing, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut;



Gambar 4.1 Konsep Tapak

Sumber : gambar pribadi 2023

Tampak dari luar ketika memasuki tapak akan terlihat seperti tertuju ke satu tujuan utama yaitu bangunan utama gedung DPRD

sehingga sangat memudahkan pengguna atau pengunjung untuk beraktivitas didalam tapak. Penerapan pagar dari batu dan adanya pendopo memberikan kesan tradisional serta penambahan vegetasi pada tapak, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut;

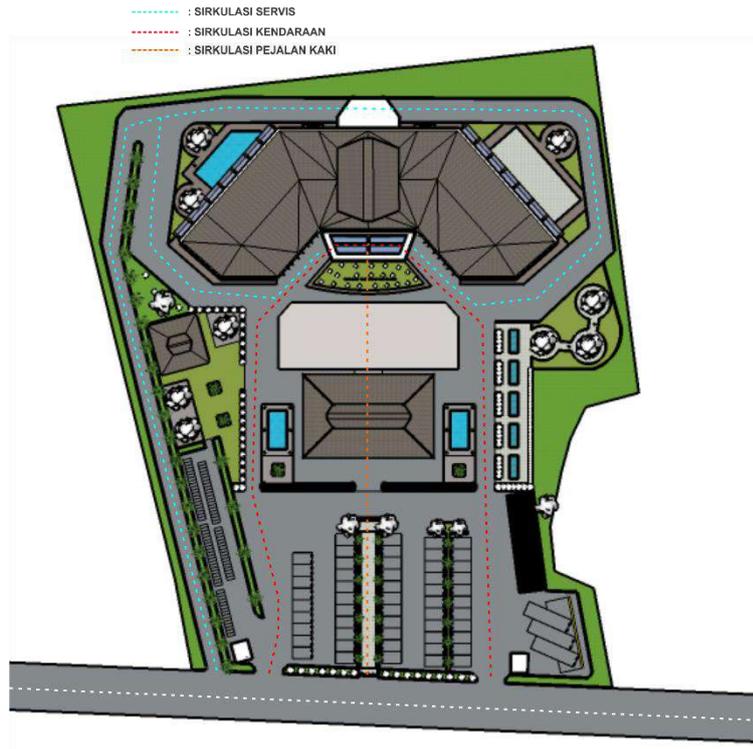


Gambar 4.2 View Dari Luar Tapak

Sumber : *gambar pribadi 2023*

4.1.2. Konsep Sirkulasi Tapak

Sirkulasi dibedakan menjadi 3 yaitu, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki dan sirkulasi servis. Sirkulasi kendaraan hanya terbatas pada parkir sepeda motor, bus dan untuk mobil bisa masuk kedalam tapak sampai lokasi drop of didepan bangunan utama gedung DPRD sedangkan sirkulasi pejalan kaki mulai dari depan tapak sampai ke bangunan utama dan hampir seluruh tapak dapat diakses oleh pejalan kaki dan sirkulasi servis memiliki jalur khusus yang hanya bisa diakses ketika ada kebutuhan tertentu saja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut;



Gambar 4.3 Konsep Sirkulasi
 Sumber : gambar pribadi 2023

4.1.3. Konsep Ruang Luar

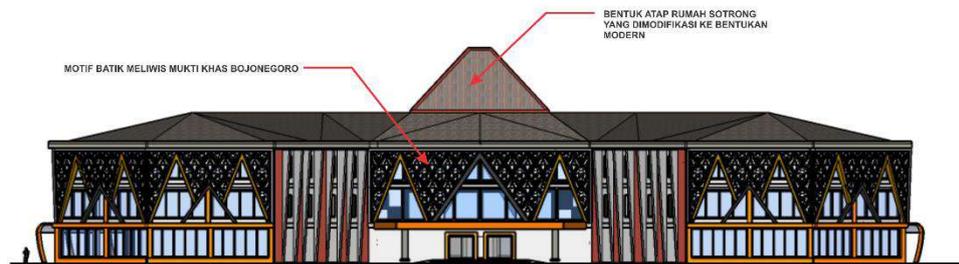
Pada konsep ruang luar terdapat elemen air pada tengah tapak tepatnya disamping pendopo serta area hijau berupa taman dan sitting grup yang berada disekitar bangunan dan ada fasilitas olahraga dibelakang gedung utama, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut;



Gambar 4.4 Konsep Ruang Luar
 Sumber : gambar pribadi 2023

4.1.4. Konsep Bangunan

Pada konsep bangunan ini juga akan menunjukkan bentuk bangunan yang mempertimbangkan beberapa unsur budaya dan seni yang ada di Bojonegoro yang kemudian diaplikasikan menjadi bentukan fasad, serta atap dari bangunan tersebut mengadopsi dari bentuk atap rumah sotrong yaitu rumah khas suku samin yang ada di Bojonegoro yang dimodifikasi ke bentukan modern, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut;



Gambar 4.5 Konsep Bangunan

Sumber : gambar pribadi 2023



Gambar 4.6 Bangunan Utama Gedung DPRD

Sumber : gambar pribadi 2023

Sedangkan pada konsep interior menggunakan material yang terbaru dan modern yang berkembang saat ini serta tidak lupa menghadirkan unsur lokal untuk menambah kesan tradisional dan penggunaan material kaca sebagai pencahayaan alami serta memperbanyak bukaan.

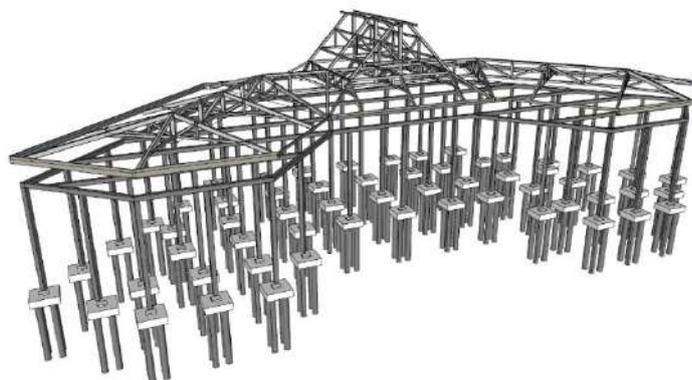


Gambar 4.7 Interior Bangunan

Sumber : gambar pribadi 2023

4.1.5. Konsep Struktur

Sistem struktur pada bangunan gedung DPRD Bojonegoro ini dibagi menjadi tiga sub structure struktur bawah menggunakan pondasi bore pile dengan kedalaman 7 meter, struktur tengah yang menggunakan kolom beton bertulang dengan dimensi 40x40 dan untuk struktur atas menggunakan rangka baja WF ukuran 40 dengan penutup genteng galvalum, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut;



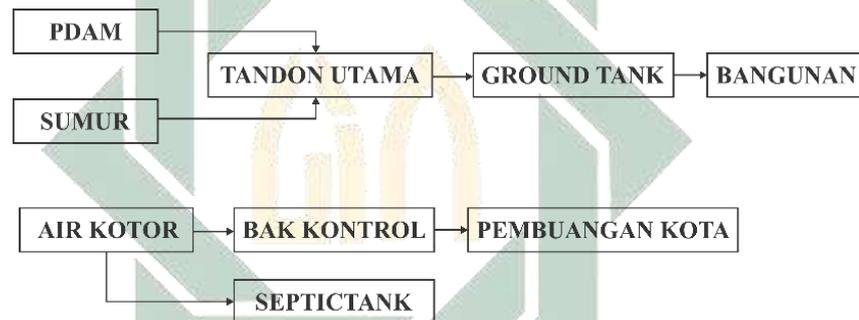
Gambar 4.8 Konsep Struktur

Sumber : gambar pribadi 2023

4.1.6. Konsep Utilitas

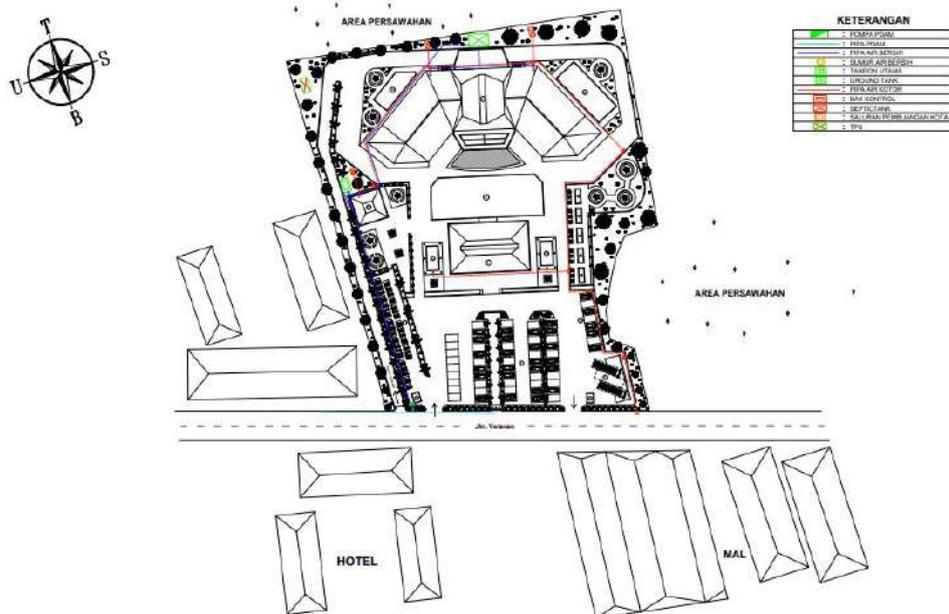
4.1.6.1. Utilitas air bersih dan kotor

Sistem air bersih pada perancangan gedung DPRD di Kabupaten Bojonegoro ini bersumber dari PDAM dan sumur pribadi yang kemudian ditampung ke tandon besar utama dan kemudian didistribusikan ke ground tank bangunan kemudian dipompa dan baru disalurkan ke setiap kamar mandi pada bangunan. Untuk sistem air kotor sendiri pada perancangan gedung DPRD di Kabupaten Bojonegoro ini menggunakan sistem bak control pada bangunan dan kemudian pada grey water dan air hujan dialirkan menuju ke aliran pembuangan riol kota, yang dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.9 Skema Sanitasi Air Bersih Dan Kotor

Sumber : gambar pribadi 2023

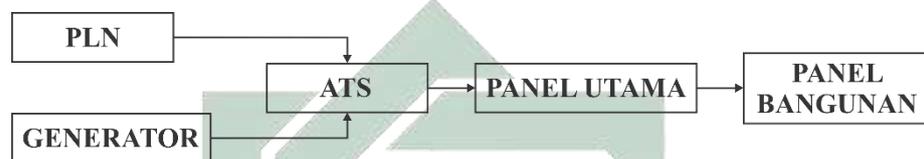


Gambar 4.10 Layout Air Bersih dan Kotor

Sumber : gambar pribadi 2023

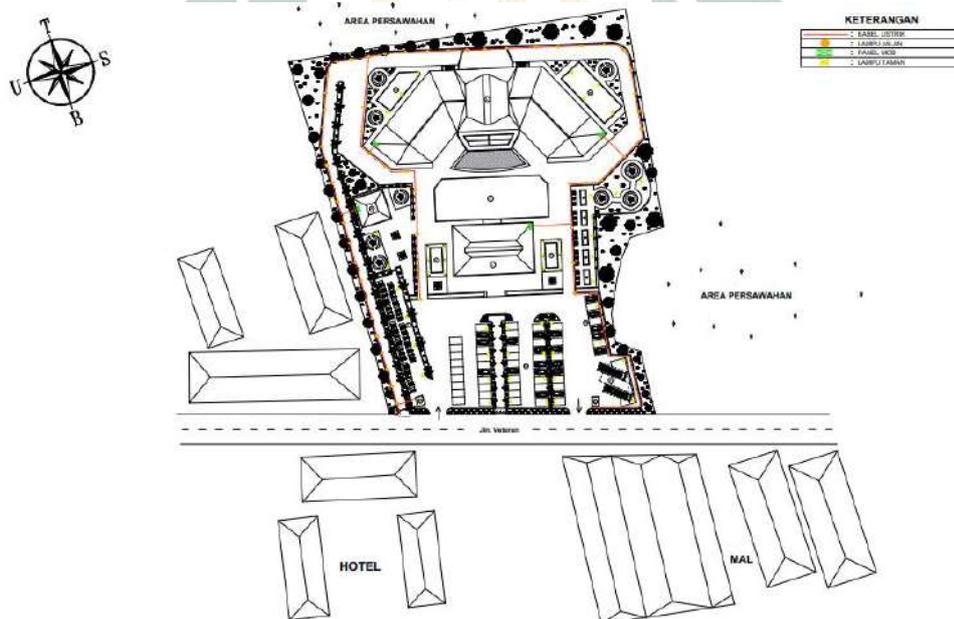
4.1.6.2. Utilitas Listrik

Untuk utilitas listrik ada dua sumber yaitu dari PLN dan dari generator untuk cadangan ketika ada pemadaman dari PLN yang disalurkan ke ATS (automatic transfer switch) kemudian disalurkan ke setiap bangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.11 Skema Kelistrikan

Sumber : gambar pribadi 2023

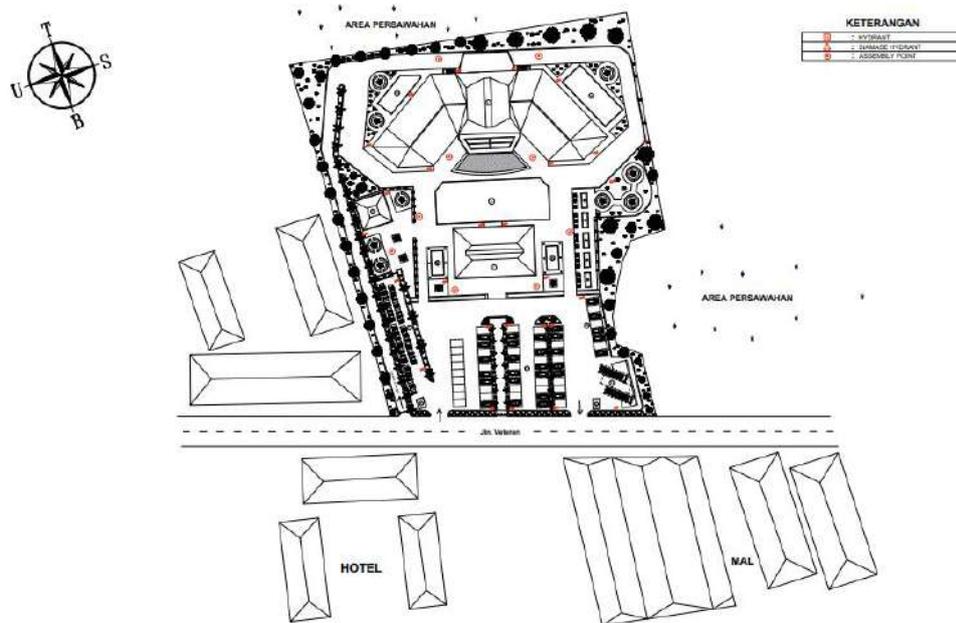


Gambar 4.12 Layout Utilitas Listrik

Sumber : gambar pribadi 2023

4.1.6.3. Utilitas Pemadam Kebakaran

Sistem pemadam kebakaran menggunakan hydant box yang diletakkan pada titik yang mudah dijangkau dari bangunan yang dialirkan dari pusat sumber air dari groundptank utama, yang dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.13 Layout Utilitas Kebakaran

Sumber : gambar pribadi 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada perancangan gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro ini menggunakan pendekatan arsitektur neo-vernakular. Dari pendekatan tersebut konsep perancangan dengan mempertimbangkan unsur-unsur lokal yang ada di Bojonegoro kemudian diimplementasikan kepada perancangan gedung DPRD Bojonegoro. Konsep tersebut diterapkan pada elemen desain baik dari zonasi, bentuk bangunan, aktivitas pengguna serta material. Dengan penerapan arsitektur neo-vernakular gedung DPRD Bojonegoro dapat menunjang kinerja DPRD sendiri agar lebih progresif serta hasil perancangan yang mencerminkan unsur lokal Bojonegoro.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Badrut Anggara P,(2021). *Kajian Arsitektur Kontekstual pada Perancangan Desa Wisata Samin di Bojonegoro*. Universitas Diponegoro; Semarang.
- Haris Sunansyah, Eryani Nurma Yulita, (2017). *Prinsip Struktur Rumah Srotong Suku Samin Sebagai Dasar Perancangan Rumah Tinggal Tahan Gempa*. Universitas Brawijaya; Malang.
- Wawan Ardiyan S, Arcadius Mahatma N, (2016). *Arsitektur Perilaku : Desain DPRD Bojonegoro*. Institut Teknologi 10 November; Surabaya.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Standar Luas Bangunan Gedung Kantor.
- Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Republik Indonesia. Persyaratan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun 2016. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri PU No.45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN)
- Yani Ahmad. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesian Government System: Theory And Practice Approaches Of 1945' Constitution)*.

Universitas Padjadjaran; Bandung.

Neufert, Ernst, 2002. Data Arsitek. Jakarta: Erlangga.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A